

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teoritis

#### 2.1.1 Partisipasi

##### 2.1.1.1 Pengertian Partisipasi

Menurut Tilar (2009) *dalam* Mujaffar (2020) mengungkapkan bahwa partisipasi merupakan wujud keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi perencanaan dari bawah (*Bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakat. Sedangkan menurut Hopley (1996) *dalam* Manshur (2021) partisipasi masyarakat adalah bentuk keikutsertaan masyarakat yang dilihat dari tipe keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan atau program yang sedang berlangsung. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil Pembangunan. Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Djalal et.al (2019) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.

Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. Pentingnya partisipasi tumbuh dari pengakuan yang dimiliki orang dalam ekonomi rendah di dunia yang menderita akibat perkembangan, sehingga semua orang perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, implementasi dan manfaat sehingga tidak ada definisi yang disepakati

Dapat disimpulkan partisipasi masyarakat adalah pemberian kekuasaan kepada masyarakat atau individu dalam proses menetapkan tujuan dan keputusan guna mengendalikan sumber daya serta mencapai kehidupan yang lebih baik dimasa mendatang. Dalam hal ini masyarakat merupakan aktor yang memiliki kepentingan atau pengaruh dalam proses pelaksanaan partisipasi masyarakat

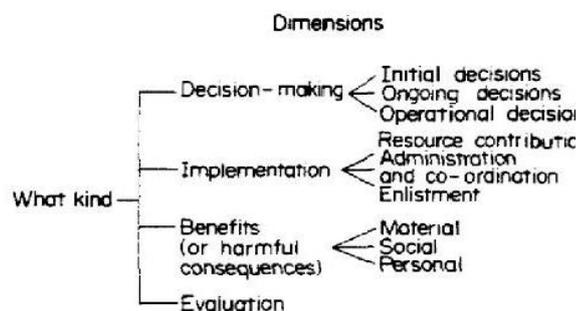
dalam suatu kegiatan dengan begitu tingkat tipe keterlibatan masyarakat dapat dilihat berdasarkan kekuasaan yang dimiliki masyarakat.

### 2.1.1.2 Bentuk Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu kegiatan. Dosseldorp *dalam* Mardikanto (2013) menyatakan bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
- b. Melibatkan diri pada diskusi kelompok
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
- d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Selain itu, partisipasi masyarakat dapat berbentuk berbagai macam, luasnya dimensi dari partisipasi masyarakat menjadi salah satu hal yang menyulitkan dalam penstrukturan bentuk partisipasi. *Cohen* dan *Uphof* (1980) berpendapat bahwa dalam penstrukturan bentuk dari partisipasi masyarakat yang perlu diperhatikan adalah tiga aspek dasar yaitu bentuk partisipasi, orang yang berpartisipasi dan cara berpartisipasi. Lebih lanjut *Cohen* dan *Uphof* (1980) berpendapat bahwa bentuk partisipasi dapat dibagi dalam 4 tahap partisipasi masyarakat, seperti disajikan pada Gambar 1 berikut.



Sumber: *Cohen* dan *Uphof* (1980)

**Gambar 1. Tahap Partisipasi**

*Cohen* dan *Uphoff* (1980) membagi bentuk partisipasi dalam 4 tahapan, tahap pertama yaitu tahap pengambilan keputusan (*decision making*), pada tahap ini bentuk partisipasi dibagi menjadi 3 bentuk yaitu:

1. Bentuk partisipasi dalam pengambilan Keputusan, (*decision making*), pada tahap ini bentuk partisipasi dibagi menjadi 3 bentuk partisipasi dalam pengambilan Keputusan pada inisiasi (*inisation*), bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan pada saat pelaksanaan (*on going*), dan terakhir bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan pada operasional.
2. Bentuk partisipasi dalam implementasi (*implementation*), pada tahap ini dibagi menjadi 3 bentuk yaitu bentuk partisipasi dalam kontribusi sumber daya, partisipasi yang terlibat dalam bentuk administrasi dan koordinasi adalah kontribusi dalam program yang dibuat oleh pemerintah dan masyarakat, dan yang ketiga adalah bentuk partisipasi dalam tahap menikmati keuntungan sosial, keuntungan materi, dan partisipasi dengan menikmati keuntungan personal
3. Tahap partisipasi dalam bentuk evaluasi, pada tahap ini bentuk partisipasi hanya dibagi dua yaitu evaluasi secara langsung dan evaluasi secara tidak langsung.
4. Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil, pada tahap ini bentuk partisipasi hanya memperoleh hasil dari semua proses yang telah dilakukan

### **2.1.1.3 Tingkat Partisipasi**

Wilcox dalam Mardikanto (2013) menyatakan, dilihat dari tingkat atau tahapan partisipasi terdapat 5 (lima) tingkatan, antara lain:

- a) Memberikan informasi (*information*)
- b) Konsultasi (*consultation*) yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut
- c) Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*), dalam arti memberi dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan
- d) Bertindak bersama (*acting together*), dalam arti tidak sekedar ikut serta dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.

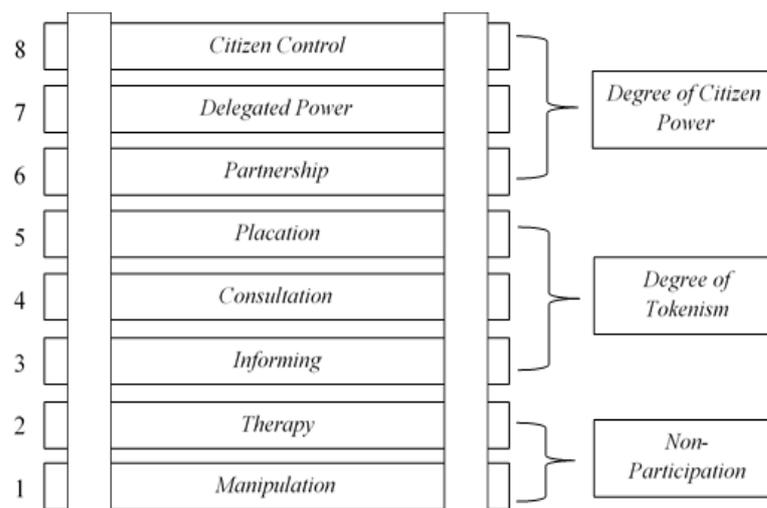
Tingkat partisipasi berdasarkan teori Arstein (1969) dalam bukunya "*A Ladder of Citizen Participation*" menjelaskan mengenai tingkat partisipasi

masyarakat identik dengan kekuasaan yang dimiliki masyarakat dan terbagi menjadi beberapa tipologi pada gambar 2.1 yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak ada partisipasi (*Non-Participation*), merupakan tipologi partisipasi paling rendah, dimana partisipasi masyarakat hanya sebagai obyek dalam suatu kegiatan. Tipologi ini terdiri dari 2 (dua) anak tangga atau tingkatan partisipasi masyarakat, yaitu:
  - a. Manipulasi (*Manipulation*), pada tahap ini tidak adanya komunikasi ataupun dialog dalam perencanaan.
  - b. Terapi (*Therapy*), pada tahap ini telah ada komunikasi (hanya satu arah) namun masih bersifat terbatas. Inisiatif datang dari pemerintah.
2. Tokenisme (*Degrees of Tokenism*), merupakan tipologi partisipasi kedua yang dimana terjadi penghargaan dan mengalah. Artinya masyarakat sudah diberikan kesempatan dalam mengemukakan pendapat, tetapi keputusan yang akan diambil merupakan hak sepenuhnya keputusan pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pada tipologi ini terdiri dari 3 (tiga) anak tangga atau tingkatan partisipasi masyarakat, yaitu:
  - a. Informasi (*Informing*), pada tingkatan ini komunikasi (satu arah) telah sering dilakukan tetapi tidak ada sarana timbal-balik. Informasi telah diberikan kepada masyarakat tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan memberikan tanggapan balik (*feed back*)
  - b. Konsultasi (*Consultation*), pada tingkatan ini komunikasi (dua arah) tetapi masih bersifat partisipasi yang ritual atau formalitas. Sudah ada aspirasi dari masyarakat tetapi belum ada jaminan apakah aspirasi akan dilaksanakan.
  - c. Perdamaian (*Placation*), pada tingkatan ini komunikasi (dua arah) telah berjalan dengan baik dengan adanya negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan saran atau pendapat mengenai kegiatan tetapi pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut.
3. Kekuasaan Masyarakat (*Citizen Power*), merupakan tipologi paling tinggi dalam partisipasi masyarakat hal ini dikarenakan masyarakat telah memiliki hak, wewenang, tanggung jawab dan kuasa penuh dalam menjalankan suatu

kegiatan yang ditandai dengan adanya kesepakatan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Pada tipologi ini terdiri dari 3 (tiga) anak tangga atau tingkatan partisipasi masyarakat, yaitu:

- a. Kemitraan (*Partnership*), pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar. Tetapi masyarakat masih tidak memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan, melainkan memberikan kesempatan untuk bernegosiasi dalam melakukan kesepakatan. Contohnya masyarakat melakukan negoisasi dengan pemegang kekuasaan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, ataupun *money*.
- b. Pendelegasian kekuasaan (*Delegated Power*), pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan *money*, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program tersebut.
- c. Pengendalian masyarakat (*Citizen Control*), masyarakat memiliki wewenang sepenuhnya dalam mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama tanpa campur tangan pemerintah.



Sumber: Teori Arstein (1969) dalam *A Ladder of Participation*, 2022

### Gambar 2. Tangga Partisipasi Masyarakat

Setiap anak tangga mewakili tingkat partisipasi yang berbeda berdasarkan pada distribusi kekuasaan antara pemerintah dengan masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan tingkatan tersebut, Arnstein (1969) berpendapat

bahwa partisipasi masyarakat dapat dinilai dari tingkatan anak tangga sesuai dengan derajat wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki masyarakat dapat proses pengambilan keputusan.

#### **2.1.1.4 Tipe Partisipasi Masyarakat**

Teori Hobbey (1996) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat dari tipe keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan atau program. Menurut Hobbey (1996), tipe keterlibatan partisipasi masyarakat dibagi menjadi 7 tingkatan, yaitu:

1. Partisipasi Manipulatif (*Manipulation Participation*), adalah partisipasi yang dimana masyarakat diberitahukan apa yang sedang atau telah terjadi. Adanya pemberian informasi secara sepihak oleh pelaksana kegiatan tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat. Informasi yang tersebar masih terbatas bagi masyarakat.
2. Partisipasi Pasif (*Passive Participation*), adalah kondisi dimana masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait kegiatan yang sedang atau telah terjadi. Masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses dari kegiatan. Serta hasil dari kegiatan tersebut tidak dibahas bersama masyarakat.
3. Partisipasi melalui konsultasi (*Participation by Consultation*), adalah masyarakat berpartisipasi melalui tanya jawab atau diskusi (konsultasi) dan diharapkan dapat menghasilkan identifikasi permasalahan dan aspirasi dari masyarakat. Orang luar mendengarkan, menganalisis masalah dan pemecahannya. Tidak ada peluang pembuatan keputusan bersama para profesional tidak berkewajiban untuk mengajakukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.
4. Partisipasi untuk Insentif (*Participation for Material Incentives*), merupakan partisipasi masyarakat melalui dukungan berupa material (finansial, pangan atau intensif material lainnya) dan non-material (tenaga kerja). Misalnya, petani yang dapat menyediakan tenaga kerja atau lahan sawah mereka akan dilibatkan dalam proses percobaan-percobaan dan pembelajaran yang dilakukan oleh suatu organisasi. Tetapi tipe keterlibatan ini memiliki kelemahan yaitu apabila insentif habis maka teknologi yang digunakan dalam

program juga tidak akan berlanjut.

5. Partisipasi Fungsional (Functional Participation), merupakan partisipasi masyarakat yang membentuk kelompok untuk mencapai tujuan kegiatan. Pembentukan kelompok biasanya setelah adanya keputusan-keputusan utama yang telah disepakati. Kelompok ini awalnya akan bergantung dengan pihak luar (fasilitator, pemerintah, dsb) tetapi, secara bertahap akan menunjukkan kemandiriannya.
6. Partisipasi Interaktif (Interactive Participation), merupakan pengambilan keputusan yang bersifat lokal dan menentukan penggunaan sumber daya yang tersedia, sehingga kelompok tersebut memiliki kekuasaan untuk menjaga potensi dan ketersediaan sumber daya alam yang ada di lingkungannya.
7. Partisipasi Inisiatif (Self Mobilisation), merupakan partisipasi masyarakat yang melakukan pengambilan keputusan secara inisiatif dan independen dari lembaga luar untuk melakukan perubahan sistem. Masyarakat tetap terhubung dengan lembaga eksternal mengenai sumber daya dan teknik yang mereka perlukan dan juga mengawasi bagaimana sumber daya tersebut digunakan.

Menurut Hobbey (1996) suatu program dapat dikatakan berhasil tergantung sampai pada tingkatan apa tipe partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia dapat dikatakan turut berpartisipasi. Sedangkan menurut Sugiyah (2006) dalam Mujaffar (2020) mengklarifikasikan partisipasi masyarakat menjadi 2 (dua) berdasarkan keterlibatannya yaitu:

1. Partisipasi Langsung

Partisipasi langsung terjadi apabila individu atau masyarakat menampilkan keikutsertaannya secara langsung di dalam proses partisipasinya. Misalnya partisipasi masyarakat dalam mengajukan pendapat atau pandangannya dalam membahas suatu pokok permasalahan.

2. Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi tidak langsung terjadi apabila individu atau masyarakat mendelegasikan hak partisipasinya. Artinya partisipasi individu atau masyarakat

hanya dijadikan sebagai subjek dalam usaha memenuhi kebutuhannya.

### 2.1.2 Tanaman Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis Guineensis Jacq*) berasal dari Nigeria, Afrika Barat. Namun, ada sebagian pendapat menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari kawasan Amerika Selatan yaitu Brazil. Hal ini karena lebih banyak ditemukan spesies kelapa sawit di hutan Brazil dibandingkan dengan di Afrika. Tanaman kelapa sawit yang subur terdapat di Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Wilayah di Indonesia yang potensial sebagai lahan perkebunan kelapa sawit antara lain sebagian besar dataran rendah Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Dalam dunia tumbuhan tanaman kelapa sawit tersusun dalam sistematika sebagai berikut:

Divisi	: <i>Embryophyta Siphonagama</i>
Kelas	: <i>Angiospermae</i>
Ordo	: <i>Monocotyledonae</i>
Famili	: <i>Arecaceae</i>
Subfamili	: <i>Cocoideae</i>
Genus	: <i>Elaeis</i>
Spesies	: <i>E. Guineensis Jacq</i>

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis Jacq*) merupakan salah satu tanaman perkebunan yang penting sebagai penghasil minyak nabati untuk produk makanan, minyak industri, maupun bahan bakar nabati (biodisel). Banyaknya variasi produk turunan dari minyak kelapa sawit menyebabkan tanaman ini memiliki nilai strategis dan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan ekspor bagi Indonesia (Teoh dalam Hutasoid, 2015).

Tanaman kelapa sawit disebut dengan *Elaeis guineensis Jacq* yang berasal dari Elaion yang dalam bahasa Yunani berarti minyak. Guineensis berasal dari kata Guinea yaitu pantai Barat Afrika dan Jacq singkatan dari Jacquin seorang Botanist dari Amerika.

#### a. Syarat Tumbuh

Pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor luar maupun faktor dalam tanaman kelapa sawit itu sendiri, faktor dalam antara lain jenis dan varietas tanaman, sedangkan faktor luar adalah faktor lingkungan, antara lain iklim dan tanah, serta teknik budidaya yang dipakai Mangoensoekarjo dan Haryono (2008).

### 1) Curah Hujan

Kelapa sawit memerlukan curah hujan yang sangat tinggi yaitu 1.500 – 4.000 mm pertahun, akan tetapi curah hujan yang ideal untuk kelapa sawit yaitu 2.000 mm pertahun, terbagi merata sepanjang tahun dan tidak terdapat periode kering yang tegas. Berikut beberapa pengaruh yang di sebabkan oleh curah hujan (Lubis & Agus, 2018). Curah hujan tinggi menyebabkan produksi bunga tinggi, persentase buah menjadi rendah, penyerbukan terhambat, sebagian *pollen* (serbuk sari) terhanyut oleh air hujan. Curah hujan rendah menyebabkan pembentukan daun terhambat serta pertumbuhan bunga dan buah menjadi terhambat.

### 2) Suhu dan Tinggi Tempat

Temperatur optimal untuk pertumbuhan kelapa sawit 24 – 28°C. Karena tinggi tempat mempengaruhi suhu udara, maka ketinggian tempat yang ideal untuk kelapa sawit antara 1-500 mdpl (meter diatas permukaan laut) (Silalahi dan Endang, 2017).

### 3) Penyinaran Matahari

Tanaman kelapa sawit membutuhkan banyak sinar matahari untuk pertumbuhan yang optimun. Intensitas penyinaran matahari yang baik adalah 5-7 jam/hari. Penyinaran matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan, tingkat asimilasi, pembentukan bunga, dan produksi buah (Silalahi dan Endang, 2017). Beberapa dampak dari kurangnya penyinaran matahari adalah:

- a) Pertumbuhan tanaman lambat karena tingkat asimilasi rendah.
  - b) Pertumbuhan bunga betina menjadi berkurang pada tanaman dewasa (TM).
  - c) Menurunnya produktivitas tanaman.
- ### 4) Kesesuaian Lahan

Kesesuaian lahan merupakan keadaan tingkat kecocokan dari suatu lahan untuk penggunaan tertentu, baik di bidang pertanian maupun bidang perkebunan. Kelas kesesuaian suatu wilayah dapat berbeda-beda tergantung pada penggunaan lahan (Lubis dan Agus, 2011).

Kriteria kesesuaian lahan merupakan pedoman yang digunakan dalam menentukan dan mengevaluasi lahan yang disurvei bagi keperluan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Pardamean (2017) mengemukakan bahwa, faktor utama yang menentukan produktivitas tanaman adalah faktor genetik. Faktor genetik

bersifat permanen efeknya terhadap pertumbuhan tanaman. Sekali menggunakan tanaman dengan susunan genetik yang baik akan mendapatkan pertumbuhan dan hasil yang baik sepanjang siklus hidup tanaman kelapa sawit jika pemeliharaan dan pemupukan yang dilakukan sesuai kultur teknis yang benar. Sebaliknya, apabila menggunakan bahan tanam yang kualitas genetik rendah, akan mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan selama siklus hidup tanaman kelapa sawit.

Kontribusi biaya bahan tanam terhadap total biaya sampai menghasikan umumnya relative kecil (sekitar 5%), tetapi dampaknya sangat besar terhadap keberhasilan budidaya tanaman kelapa sawit untuk siklus hidupnya (rata-rata 25 tahun). Penggunaan bahan tanam unggul merupakan suatu keharusan. Kontribusi produksi yang tinggi akan mempercepat pengembalian investasi dan memberikan keuntungan yang berkelanjutan untuk jangka panjang.

### **2.1.3 Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)**

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua/tidak produktif dengan tanaman baru, baik secara keseluruhan maupun secara bertahap (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, 2020). Jenis peremajaan yang dilakukan dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ada 2 yaitu peremajaan dini dan peremajaan reguler. Peremajaan dini dilakukan pada kebun swadaya yang menggunakan benih tidak unggul (*illegitim*) meskipun belum memasuki umur 25 tahun dengan produksi  $\leq 10$  ton/ha/tahun. Sedangkan peremajaan reguler dilakukan pada kebun plasma pola PIR yang telah berumur 25 Tahun. Dukungan pengembangan kelapa sawit ini diberikan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kepada pekebun yang tergabung dalam kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, maupun kelembagaan lainnya (Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 29/Kpts/KB.120/3/2017).

Pada pelaksanaan kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit menurut Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 29/Kpts/KB.120/3/2017, penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan dilaksanakan melalui pelatihan. Pelatihan kepada pelaku utama, kelompok tani, gapoktan, koperasi dan kelembagaan petani lainnya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan,

keterampilan dan merubah sikap mental petani untuk mampu melakukan atau mengerjakan peremajaan tanaman kelapa sawit, diantaranya yaitu:

1. Pelatihan penumbuhan kebersamaan petani

Pelatihan ini bertujuan untuk menumbuhkan kebersamaan petani dalam kelompok sehingga tercipta kesadaran diantara sesama anggota untuk melaksanakan kegiatan usaha secara bersama-sama dalam wadah kelompok produktif.

2. Pelatihan teknik budidaya

Pelatihan ini bertujuan agar petani mampu melaksanakan kegiatan tata kelola budidaya kelapa sawit sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:131/Permentan/OT.140/12/2013 yang mengatur tentang budidaya kelapa sawit yang baik. Pelatihan ini antara lain berupa pelatihan usaha perbenihan, peremajaan, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pemeliharaan tanaman dan diversifikasi usaha.

Pelaksanaan teknis peremajaan tanaman kelapa sawit pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:18/Permentan/KB.330/5/2016 yang mengatur tentang pedoman peremajaan perkebunan kelapa sawit, antara lain meliputi:

a. Menumbang dan Mencacah (*Chipping*)

- 1) Penumbangan tanaman umumnya dilakukan dengan menggunakan alat berat, namun dapat juga dilakukan secara manual untuk skala yang lebih kecil.
- 2) Penumbangan dengan menggunakan alat berat dilakukan dengan mendorong pohon kelapa sawit yang sudah tua sampai roboh. Untuk penumbangan secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan kapak ataupun gergaji mesin.
- 3) Tanaman ditumbang searah dengan jalur penanaman dan disusun dalam rumpukan dengan arah utara selatan di area bekas jalan kontrol (pasar pikul).
- 4) Setelah ditumbang dan dirumpuk, maka batang kelapa sawit langsung di cacah(*chipping*). Pencacahan dilakukan pada saat tanaman masih segar. Jika batang sudah kering akan sulit dicacah. Pencacahan batang/pelepah dilakukan menggunakan *excavator* dengan *bucket* khusus untuk *chipping*. Pencacahan batang dimaksudkan untuk mempercepat proses dekomposisi.

b. Pancang Titik Tanam

Pola penanaman menggunakan pola segitiga sama sisi dengan jarak antar tanaman tergantung pada kondisi lahan, bahan tanaman dan iklim.

c. Pembuatan Lubang Tanam

- 1) Lubang penanaman dibuat dengan dimensi panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan dalam 40 cm. Tanah galian bagian atas dan bawah dipisahkan. Bekas akar di dalam lubang tanam harus dibersihkan. Setelah lubang tanam selesai, kemudian diisi dengan bahan organik seperti tandan kosong sawit.
- 2) Lubang tanam pada dapat dibuat dengan alat hole digger yang ditarik oleh traktor roda ban (TRB).
- 3) Pancang dikembalikan ketempat semula setelah selesai pembuatan lubang tanam. Untuk keseragaman ukuran lubang, setiap pekerja pembuat lubang harus dilengkapi mal sesuai dengan ukuran lubang.

d. Pengangkutan dan ecer benih siap salur

- 1) Benih siap salur yang baik untuk dipindahkan ke lapangan adalah berumur 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
- 2) Benih siap salur harus sudah terseleksi, kondisi baik, tidak terserang hama dan penyakit, dan sesuai dengan standar vegetatif. Benih harus sudah disiapkan 2 (dua) minggu sebelum tanam.
- 3) Dalam satu blok sebaiknya ditanam benih yang berasal dari satu jenis persilangan. hal ini bertujuan agar pertumbuhan tanaman pada blok tersebut seragam.
- 4) Benih siap salur harus disiram secukupnya untuk mengantisipasi apabila setelah ditanam tidak turun hujan.
- 5) Jumlah benih siap salur yang akan ditanam harus disesuaikan dengan kemampuan tenaga kerja, truk pengangkut, kondisi jalan, iklim dan lain-lain agar benih siap salur yang diangkut pada hari tersebut dapat tertanam seluruhnya (tidak menginap) di lapangan.
- 6) Pada saat pengangkutan ke lapangan, penyusunan benih siap salur tidak boleh saling tindih. hal ini dilakukan agar kondisi benih siap salur sampai ke lapangan dalam kondisi baik.
- 7) Benih siap salur diturunkan pada areal *supplypoint* yang telah ditentukan yang kemudian diangkut dan diecer di sisi lubang tanam.

- 8) Di setiap lubang tanam ditempatkan satu benih siap salur.
- e. Penanaman kelapa sawit
- 1) Polibag dirobek dan dilepas sebelum benih siap salur dimasukkan ke dalam lubang tanam.
  - 2) Waktu penanaman kelapa sawit antar lokasi umumnya berbeda-beda tergantung pada situasi iklim setempat.
  - 3) Penanaman sebaiknya dilakukan pada musim penghujan dimana pada saat kondisi tanah cukup lembab, maka kondisi benih yang dipindah ke lapangan dapat segera beradaptasi dengan baik.
  - 4) Benih siap salur dimasukkan ke dalam lubang tanam dengan posisi yang tegak lurus (diatur sedemikian rupa agar tidak miring), kemudian tanah dipadatkan dan dibuat piringan pohon dengan lebar 1 meter.
- f. Konsolidasi Tanaman
- 1) Tanaman yang mati, rusak, tumbang, terserang hama, dan abnormal, perlu dilakukan inventarisasi ulang 1 (satu) bulan setelah tanam.
  - 2) Tanaman yang mati, rusak, atau tumbang dibuat tanda khusus (patok pancang). hal ini digunakan untuk mempermudah pemeriksaan dan konsolidasi tanaman di lapangan.
  - 3) Tanaman yang miring ditegakkan kembali sekaligus memadatkan tanah di sekitarnya. Tanaman yang mati, rusak berat, dan abnormal perlu disisip sesegera mungkin agar pertumbuhannya tidak tertinggal dan sebaiknya menggunakan benih yang telah disediakan untuk sisipan (5%).

#### **2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pekebun Dalam Implementasi Program Peremejaan Sawit Rakyat (PSR)**

Umumnya pertimbangan pekebun dalam memilih usahatani dipengaruhi oleh faktor intern, ekstern dan motif keuntungan. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari diri pekebun atau keluarganya salah satu misalnya ialah pendidikan, pendapatan, pengalaman, luas lahan, dan, faktor eksternal meliputi bantuan modal, peran penyuluh.

1. Faktor Internal
  - a. Pendidikan

Menurut Prasetya dan Saptono (2019) Indonesia memiliki tingkat pendidikansekolah seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan

atas dan perguruan tinggi untuk membedakan tingkat pemahaman, pengetahuan dan perkembangan seseorang. Tingkat pendidikan memengaruhi pengembangan daya pikir dan peningkatan kompetensi petani. Selain itu, tingkat pendidikan akan meningkatkan kemampuan kognitif petani yang akan berpengaruh pada kemampuan petani dalam menyerap dan mengolah informasi (Fharaz *et al.*, 2022). Selanjutnya menurut Anggraeni *et al.*, (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki para petani dapat memudahkan petani dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat, baik itu dari informasi penyuluhan, maupun informasi yang didapatkan secara mandiri baik melalui media online maupun buku.

#### b. Pendapatan

Pendapatan adalah hasil yang paling diinginkan dan diharapkan dalam melakukan suatu usaha, Pendapatan sangatlah berpengaruh besar dalam menentukan keberhasilan suatu usaha yang dilakukan. Jika dihubungkan dengan kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit, pekebun akan mengalami kehilangan pendapatan selama 4 tahun kedepan, karena tempat dan mata pencaharian mereka sedang diremajakan sehingga tingkat pendapatan mereka akan berkurang (Pambela *et al.*, 2012).

#### c. Pengalaman

Pengalaman merupakan salah satu hasil yang diperoleh manusia melalui interaksi yang dilakukan dengan lingkungan (Darmawan, 2013). Pengalaman adalah suatu tingkat penguasaan Sikap dan keterampilan yang didapatkan seseorang akibat perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukannya. Semakin lama seseorang menekuni suatu aktivitas, maka akan semakin banyak pengalaman yang ia dapatkan melalui apa yang dilakukannya

#### d. Luas Lahan

Menurut Mandang *et al.*, (2022) luas lahan responden adalah areal lahan yang diusahakan oleh petani yang dinyatakan dalam hektar (ha). Luas penguasaan lahan pertanian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses produksi ataupun usahatani, luas lahan akan mempengaruhi besarnya produksi yang diusahakan dan kesejahteraan yang akan mereka peroleh. Menurut Pinem (2021) menyatakan bahwa lahan merupakan salah satu faktor penting dalam usahatani

yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan petani. Besar kecilnya produksi dari usaha tani antara lain dipengaruhi oleh luas sempitnya lahan yang digunakan. Selain merujuk pada semakin meningkatnya pendapatan, menurut Mardikanto (2013) semakin luas lahan usahatani biasanya semakin cepat petani menerima atau menerapkan suatu inovasi, karena memiliki kemampuan ekonomiyang lebih baik.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Bantuan Modal

Faktor modal merupakan faktor yang sangat memberatkan pekebun ketika peremajaan akan dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pekebun, mereka rata-rata tidak akan sanggup melakukan peremajaan apabila dilaksanakan dengan modal sendiri (Pambela *et al*, 2012)

### b. Peran Penyuluh

Penyuluh ternyata memiliki peran penting terhadap tingkat partisipasi pekebun. Yang mana seorang penyuluh ikut terlibat dalam menjalankan dan mendampingi petani di suatu kegiatan seperti dalam program peremajaan sawit rakyat (PSR) untuk membantu dan mengembangkan usaha tani para pekebun. Dimana tingkat pendukung itu merupakan penyuluh memberikan materi sebelum melaksanakan kegiatan dan pemerintah membantu dengan memberikan sarana dan prasarana atas program yang akan dilakukan nantinya (Mirza 2022).

Peran penyuluh pada dasarnya sebagai pembimbing dalam usaha tani, sebagai teknisi, sebagai penghubung serta sebagai organisator dan dinamisator yang mempengaruhi kelompok tani. Dalam implementasinya penyuluh melakukan pendekatan terhadap kelompok-kelompok tani dengan membedakan kelompok tani menjadi beberapa kelas yaitu kelas pemula, kelas madya, kelas lanjut dan kelas utama. Terjadinya hubungan yang harmonis antara penyuluh dengan pekebun dapat mempengaruhi keberhasilan suatu penyuluhan pertanian. Peranan penyuluh yang cukup strategis sebagai ujung tombak pembangunan pertanian akan dapat berjalan sesuai dengan tujuan apabila mendapat respon dari masyarakat tani (Faisal 2017).

Dalam Permentan Nomor 27 Tahun 2023 Tugas pokok penyuluh pertanian adalah melakukan kegiatan penyuluhan pertanian kepada pelaku utama dan pelaku

usaha sesuai dengan rencana kerja penyuluhan pertanian yang disusun berdasarkan program penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya. Oleh karena itu, penyuluh berperan sebagai organisator dan dinamisator yaitu melakukan pembinaan kelompok tani yang diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, dan peningkatan peranan petani. Peran serta petani dan penyuluh dengan menumbuhkan kembangkan kerja sama antar petani dan penyuluh untuk mengembangkan usahatani. Selain itu pembinaan kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah usahatani anggotanya secara lebih efektif dan memudahkan dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

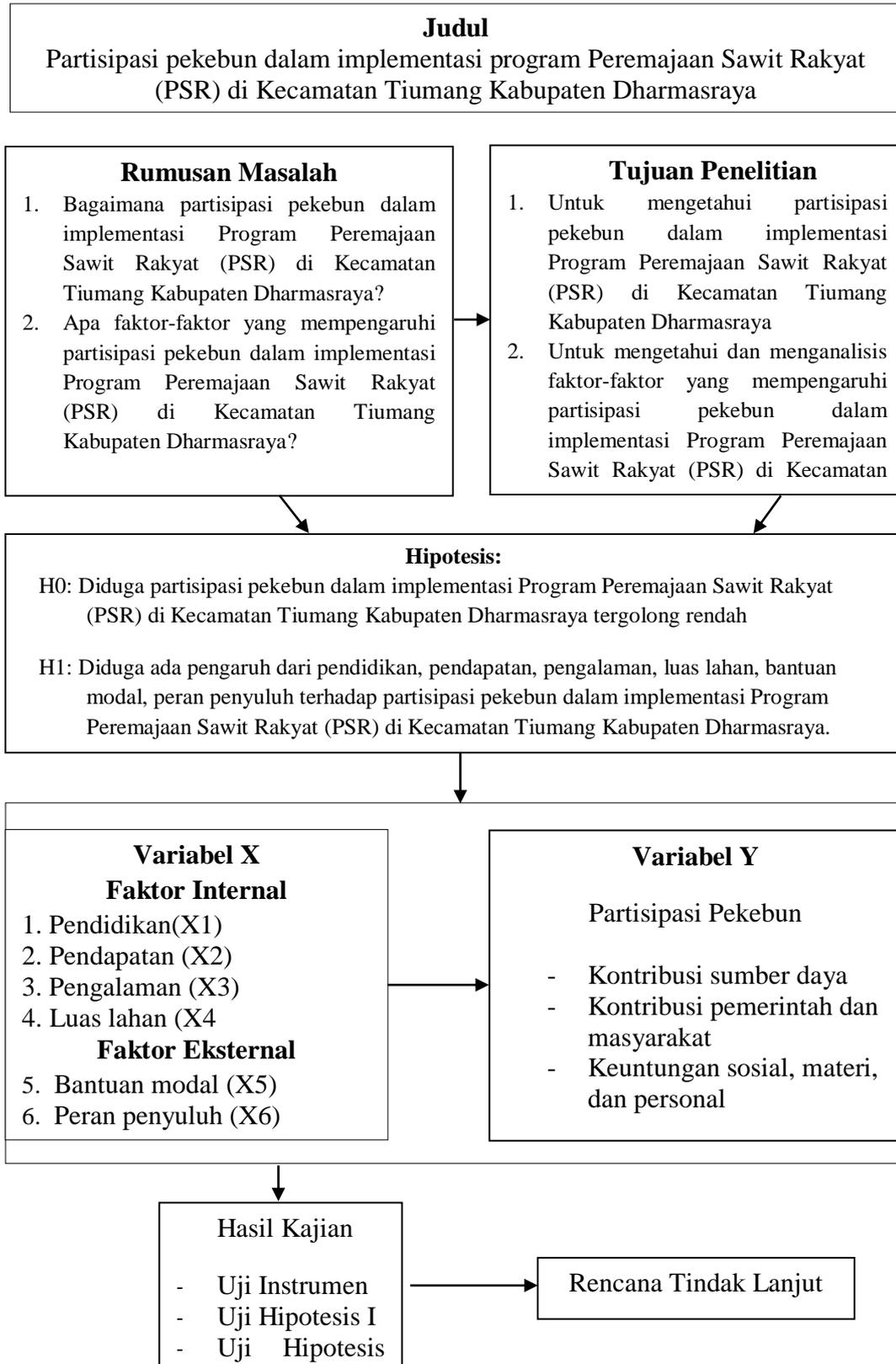
**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Tujuan Penelitian	Vaiabel	Hasil Penelitian
1	Shinta Anggreany, dkk (2019)	Untuk mengetahui tingkat petani dalam <i>replanting</i> kelapa sawit dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dalam <i>replanting</i> kelapa sawit.	Umur, Pendidikan, Pendapatan, dan kosmopolitan	Tingkat partisipasi petani dalam <i>replanting</i> kelapa sawit termasuk kategori rendah, salah satunya dikarenakan faktor ekonomi. Partisipasi petani dalam kegiatan <i>replanting</i> pada aspek teknik budidaya tergolong sedang yaitu petani aktif melakukan perawatan namun hanya sebagian kecil yang menggunakan benih bersertifikat dan melakukan penumbangan tidak sesuai dengan anjuran pemerintah
2	Farmelia R. Hutasoit, dkk (2020)	Untuk menganalisis Patisipasi Petani Kelapa Sawit Swadaya Bersertifikasi RSPO Dalam Menghadapi Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pela lawan	Pengalaman, Pendapatan, peran penyuluh.	Patisipasi petani dalam penelitian ini dilihat dari berbagai aspek diantaranya aspek input, aspek finansial, aspek pasar, aspek teknologi, aspek kelembagaan, dan aspek pendapatan.
3	Miftah Aulia (2019)	Untuk mengetahui Partisipasi Petani dalam	Luas lahan, pendapatan, motivasi, pengalaman,	Tingkat partisipasi petani dalam pelaksanaa program peremajaan sawit rakyat (PSR) tinggi yaitu 70%, kemudian hasil penguji rank

**Lanjutan Tabel 1**

No	Nama	Tujuan Penelitian	Vaiabel	Hasil Penelitian
		Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara	bantuan modal dan ketersediaan saprodi.	spearman dengan membandingkan nilai $t_{hitung} > t_{Tabel}$ menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara faktor luas lahan, pendapatan, motivasi, pengalaman, bantuan modal dan ketersediaan saprodi
4	Pipin Dwi Astiti, dkk. (2022)	Untuk mengetahui Implementasi Peremajaan Sawit Rakyat. (Studi Kasus: KUD Tunas Muda Kabupaten Siak, Riau)	Umur, pendidikan, pengalaman, pendapatan	Hasil analisis Patisipasi petani menunjukkan aspek input, aspek finansial dan aspek kelembagaan yang berpengaruh pada keputusan petani dalam pelaksanaan peremajaan. Aspek keterlibatan <i>stakeholder</i> terdiri dari 3 komponen sub aspek yaitu: <i>stakeholder</i> terkait, hak <i>stakeholder</i> dan kewajiban <i>stakeholder</i> . Pelaksanaan peremajaan kelapa sawit melalui program PSR sangat membantu petani kelapa sawit dan Program PSR ini hanya dapat diterima oleh petani kelapa sawit yang tergabung dalam keanggotaan KUD Tunas Muda.
5	M. Hafidz Ar-Raffi, 2021	Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat (Psr) Untuk Meningkatkan Produktivitas Dan Kualitas Sawit Rakyat Di Kabupaten Kotawaringi Barat Provinsi Kalimantan Tengah	Pendidikan, Pengalaman, pendapatan	implementasi kebijakan peremajaan sawit rakyat di kabupaten kotawaringin barat sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa kendala. Oleh karena itu diperlukan upaya yang harus dilakukan yaitu Menyediakan layanan khusus atau meningkatkan intensitas sosialisasi ketentuan dan aturan untuk mengikuti kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat

### 2.3 Kerangka Pikir



Gambar 3. Kerangka Berpikir

## **2.4 Hipotesis Pengkajian**

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap suatu masalah yang masih perlu diuji kebenarannya sesuai dengan model dan analisis yang cocok. Hipotesis pada pengkajian ini sebagai berikut:

1. Diduga partisipasi pekebun dalam implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya tergolong rendah.
2. Diduga ada pengaruh dari pendidikan, pendapatan, pengalaman, luas lahan, bantuan modal, peran penyuluh terhadap partisipasi pekebun dalam implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.